

## **IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA**

**Ariska Aulia Asyavira**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[ariskaauliaasyavira@gmail.com](mailto:ariskaauliaasyavira@gmail.com)

**Anggraeny Puspaningtyas**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[anggraenypuspa@untag-sby.ac.id](mailto:anggraenypuspa@untag-sby.ac.id)

**Eddy Wahyudi**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[ddywahyudi@untag-sby.ac.id](mailto:ddywahyudi@untag-sby.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Program ini merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Penelitian menggunakan jenis deskriptif demetode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini berhasil meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat, masih terdapat beberapa kendala seperti data yang belum valid, proses verifikasi yang kurang baik, dan kedekatan hubungan antara kader dengan masyarakat yang mempengaruhi hasil pendataan.

**Kata kunci:** *Program Keluarga Harapan, kemiskinan, implementasi kebijakan, Surabaya*

### **ABSTRACT**

This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Krembangan District, Surabaya City. This program is a government effort to reduce poverty levels by providing conditional social assistance to poor families. The research uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results show that although this program has succeeded in improving the welfare of beneficiaries, there are still some obstacles such as invalid data, poor verification processes, and the close relationship between cadres and the community affecting the data collection results.

**Keywords:** *PKH, poverty, policy implementation, Surabaya*

## A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini terkait dengan berbagai aspek, termasuk ketimpangan ekonomi dan distribusi pendapatan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah. Karena banyaknya orang di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, masalah kemiskinan sering kali menjadi perhatian utama. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan, namun tantangan ini tetap memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu upaya tersebut adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan keluarga miskin melalui penyediaan bantuan sosial bersyarat.

Salah satu program utama pemerintah Indonesia untuk memerangi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini terus berkembang sejak diluncurkan pada tahun 2007. Program kesejahteraan keluarga (PKH) memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka pergi ke sekolah dan mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Tujuan program ini tidak hanya mengurangi beban ekonomi keluarga miskin, tetapi juga menghentikan rantai kemiskinan antar generasi. Implementasi PKH di berbagai daerah di Indonesia telah menunjukkan hasil yang beragam, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan administrasi setempat.

**Tabel 1. 1 Data kemiskinan di Kota Surabaya, Tahun 2021-2023**

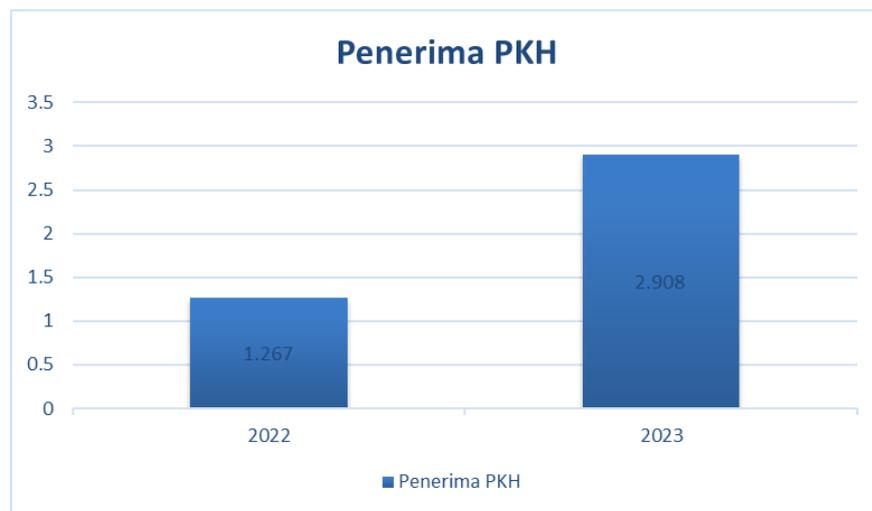
Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)
2020	5,02	145,67
2021	5.23	152.49
2022	4.72	138.21
2023	4.65	136.37

*Sumber: BPS Kota Surabaya data diolah peneliti (2024)*

Data tingkat kemiskinan di kota Surabaya dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan penurunan yang konsisten. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan berada di angka 5,02% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 145,67 ribu orang. Meskipun pada tahun 2021 terjadi peningkatan tingkat kemiskinan menjadi 5,23%, jumlah penduduk miskin juga meningkat menjadi 152,49 ribu orang. Namun, sejak itu, ada tren penurunan yang signifikan. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan turun menjadi 4,72% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 138,21 ribu orang, dan pada tahun 2023, tingkat kemiskinan kembali turun menjadi 4,65% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 136,37 ribu orang.

Meskipun data menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan, fakta bahwa masih ada lebih dari 136 ribu orang yang hidup di bawah garis kemiskinan

pada tahun 2023 adalah hal yang memprihatinkan. Angka kemiskinan yang masih relatif tinggi ini mengindikasikan bahwa banyak warga kota yang masih bergulat dengan kondisi ekonomi yang sulit. Penurunan angka kemiskinan ini tentunya merupakan hasil yang positif, tetapi upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa tren penurunan ini terus berlanjut dan semakin banyak orang dapat keluar dari kemiskinan. Dengan kata lain, meskipun kemiskinan di kota Surabaya mengalami penurunan, kondisi ini tetap menjadi tantangan yang serius dan memerlukan perhatian serta tindakan yang lebih intensif dari pemerintah dan berbagai pihak terkait.



**Gambar 1. 1 Jumlah Penerima PKH di Kecamatan Krembangan**  
*Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya data diolah peneliti (2024)*

Kecamatan Krembangan di Kota Surabaya merupakan salah satu wilayah yang menjadi fokus pelaksanaan PKH. Kecamatan ini memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam dengan tingkat kemiskinan yang masih signifikan di beberapa bagian wilayahnya. Implementasi Dari data yang ditampilkan pada grafik, dapat dilihat bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Pada tahun 2022, jumlah penerima KPM tercatat sebanyak 1.267, sedangkan pada tahun 2023 jumlah penerima KPM meningkat menjadi 2.908. Peningkatan ini mencerminkan bahwa angka kemiskinan terus bertumbuh dan situasi ini cukup memprihatinkan. Bertambahnya jumlah KPM yang membutuhkan bantuan dari PKH menunjukkan bahwa masih banyak keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan memerlukan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan ini, termasuk peningkatan program-program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

PKH di Kecamatan Krembangan seharusnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di tingkat lokal. Namun, pelaksanaan program ini tidak selalu berjalan mulus dan terdapat berbagai tantangan yang perlu

diatasi, seperti validitas data penerima manfaat, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan pemahaman masyarakat terhadap program ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan di Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari program tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Dengan memahami lebih dalam mengenai pelaksanaan PKH di tingkat lokal, diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pengembangan kebijakan perlindungan sosial di masa depan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji program serupa di daerah lain.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Menurut Dunn (2003), kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung termasuk keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Proses pembuatan kebijakan publik melibatkan beberapa tahapan utama: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tahap penyusunan agenda melibatkan pemilihan masalah-masalah yang dianggap penting untuk diselesaikan. Formulasi kebijakan mencakup pembahasan masalah-masalah yang telah diagendakan dan mencari solusi terbaik. Adopsi kebijakan melibatkan keputusan untuk mendukung atau menolak kebijakan yang telah diformulasikan. Implementasi kebijakan adalah tahap di mana kebijakan yang telah diadopsi dilaksanakan oleh badan-badan administrasi. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil memecahkan masalah yang ada.

### **Teori Implementasi Publik**

Implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik. Implementasi berasal dari bahasa Inggris "implement" yang berarti melaksanakan atau menerapkan sesuatu. Menurut Meter dan Horn, implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah disetujui dengan penggunaan sarana untuk mencapai tujuan kebijakan. George C. Edward III dalam teorinya menyatakan bahwa implementasi kebijakan melibatkan empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Sumber daya mencakup informasi, staf yang berwenang, dan fasilitas yang memadai. Disposisi adalah sikap dan komitmen pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang diterapkan. Struktur birokrasi adalah organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan bagaimana koordinasi dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif. Keempat faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Fokus penelitian adalah pada empat faktor utama dalam teori George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan koordinator PKH, pendamping PKH, dan penerima manfaat, serta observasi langsung di lapangan. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, laporan, dan publikasi terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi PKH dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta kendala dalam pelaksanaannya.

### **D. PEMBAHASAN**

#### **1. Komunikasi**

Implementasi PKH di Kecamatan Krembangan efektif jika semua tujuan kebijakan dipahami oleh masyarakat. Meskipun berbagai cara komunikasi telah dilakukan, seperti sosialisasi dengan mengundang KPM dan pihak kelurahan, serta penyampaian informasi oleh pendamping PKH, masih terdapat kendala dalam efektivitasnya. Beberapa KPM merasa informasi jelas, sementara yang lain merasa kurang jelas karena hanya didapat dari tetangga. Untuk meningkatkan kejelasan, disarankan pendamping PKH mendatangi rumah-rumah atau menghubungi KPM melalui telepon. Informasi tentang tujuan PKH disampaikan konsisten oleh berbagai pihak. Meskipun ada upaya signifikan dalam penyampaian informasi, perlu peningkatan metode seperti kunjungan langsung dan teknologi komunikasi agar implementasi PKH lebih efektif dan memberikan manfaat optimal.

#### **2. Sumber Daya**

Sumber daya memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan, dan keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada bagaimana sumber daya yang ada digunakan. Di Kecamatan Krembangan, keberhasilan PKH didukung oleh sumber daya manusia yang berkualifikasi dan informasi yang memadai. Pendamping PKH menangani 300 hingga 400 KPM, yang dianggap cukup besar namun sesuai dengan kapabilitas mereka. Meskipun sebagian besar warga merasa puas dengan pelayanan pendamping PKH, beberapa mengeluhkan kekurangan tenaga dan perhatian langsung. Selain itu, fasilitas seperti ruang kerja, peralatan kantor, dan sarana komunikasi yang disediakan oleh kecamatan mendukung operasional PKH. Selain itu, kemudahan yang ditawarkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya memudahkan pelayanan PKH.

#### **3. Disposisi**

Berdasarkan teori Edward III, Kesuksesan pelaksanaan kebijakan bergantung pada kemampuan dan pengetahuan para pelaku kebijakan. Oleh karena itu, sikap implementor kebijakan dalam menjalankan program PKH adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Pejabat dan pendamping di Kecamatan Krembangan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap

implementasi PKH. Mereka memahami pentingnya program ini dalam upaya mengurangi kemiskinan. selalu mendukung penuh setiap kegiatan yang berkaitan dengan PKH mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Fakta dilapangan pihak pelaksana dan pihak penerima sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan tahun 2021-2024. Namun, terdapat variasi dalam kualitas layanan yang diberikan sebagian warga Kecamatan Krembangan, menyatakan bahwa petugas PKH sangat ramah dan siap membantu. Mereka sering melakukan kunjungan untuk memastikan bantuan benar-benar bermanfaat. Di sisi lain, warga lainnya, mengeluhkan kurangnya komunikasi dan dukungan dari pendamping PKH yang sering tidak ada saat dibutuhkan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan PKH di Kecamatan Krembangan berjalan tanpa adanya SOP khusus atau struktur birokrasi di tingkat kecamatan. Namun, pelaksanaan program tetap didukung oleh panduan operasional yang jelas bagi pendamping. Menurut Edward III, Struktur birokrasi juga memengaruhi bagaimana para pelaku kebijakan disposisi. Program bekerja lebih baik dengan struktur organisasi yang jelas dan koordinasi yang baik di tingkat atas. Meskipun demikian, pendamping dan penerima bantuan masih kurang memahami prosedur operasi standar (SOP) dan struktur birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan penyebaran informasi yang lebih baik diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami secara menyeluruh bagaimana program ini dijalankan.

### **E. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, program ini telah dijalankan dengan upaya signifikan meskipun masih terdapat beberapa kendala. Komunikasi telah dilakukan melalui pertemuan langsung dan sosialisasi, namun pemahaman informasi di antara penerima manfaat masih bervariasi. Sumber daya manusia, terutama pendamping PKH, memiliki kapabilitas memadai meskipun beban kerja mereka besar. Fasilitas pendukung tersedia untuk memastikan kelancaran operasional, dan komitmen tinggi ditunjukkan oleh pejabat dan pendamping. Namun, birokrasi dalam pelaksanaan PKH perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih efektif dan panduan operasional yang lebih jelas. Secara keseluruhan, implementasi PKH di Kecamatan Krembangan menunjukkan keberhasilan dalam beberapa aspek, namun memerlukan perbaikan dalam kejelasan komunikasi dan efisiensi birokrasi untuk mencapai manfaat optimal bagi keluarga penerima.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran diberikan untuk meningkatkan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Krembangan Kota Surabaya. Pertama, perlu meningkatkan kejelasan dan konsistensi komunikasi dengan memperluas metode penyampaian informasi melalui acara kemasyarakatan seperti PKK, kunjungan langsung ke rumah penerima manfaat, dan pemanfaatan teknologi komunikasi seperti telepon dan aplikasi pesan. Kedua, disarankan menambah jumlah pendamping atau

menyalurkan kembali tugas untuk memastikan perhatian lebih personal bagi setiap penerima manfaat. Ketiga, peningkatan fasilitas pendukung dan infrastruktur diperlukan untuk mempermudah tugas administrasi dan koordinasi di tingkat kecamatan. Terakhir, sosialisasi lebih intensif mengenai panduan operasional dan struktur organisasi harus dilakukan agar semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman menyeluruh tentang pelaksanaan program.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, L. (2012). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta .
- Arum, D. S., & Sugiyanto, M. S. E. (2023). Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Baktijaya Kota Depok. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 134. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2831>
- Badan Pusat Statistika. (n.d.). *Profil Kemiskinan Indonesia Maret 2023*.
- Chasanah, U., Novitasari, T., Safira, A., Dan, N., Wahyudi, K. E., Studi, P., Publik, A., Veteran, U., & Timur, J. (2021a). *IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN GAYUNGAN SURABAYA PADA ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU*. 2(5).
- Chasanah, U., Novitasari, T., Safira, A., Dan, N., Wahyudi, K. E., Studi, P., Publik, A., Veteran, U., & Timur, J. (2021b). *IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN GAYUNGAN SURABAYA PADA ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU*. 2(5).
- Darmiyanti, R. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2016-2020. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 5(2), 108–123. <https://doi.org/10.36341/jdp.v5i2.2776>
- Desa, D., Kecamatan, P., Kabupaten Jember, A., Kunci, K., & Kebijakan, I. (n.d.). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)*. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEK>
- Dr. Widodo, J. M. S. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Banyumedia Publishing.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*.
- Kebijakan publik : teori, proses, dan studi kasus / B. W. ; penyunting, T. A. (2014). *Kebijakan publik : teori, proses, dan studi kasus / Budi Winarno ; penyunting, Tri Admojo*. CAPS .
- Kristian, I. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN GARUT*.
- Mahulette, A., Osok, R. M., & Leuwol, F. S. (2022a). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Masyarakat Negeri Assilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*, 1(2), 138–146. <https://doi.org/10.30598/jpguvol1iss2pp138-146>
- Mahulette, A., Osok, R. M., & Leuwol, F. S. (2022b). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Masyarakat Negeri Assilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku

- Tengah. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*, 1(2), 138–146. <https://doi.org/10.30598/jpguvol1iss2pp138-146>
- Miftah Thoha. (1984). *Dimensi-dimensi prima ilmu administrasi negara*. Rajawali.
- Mirza, & Siti Aisyah. (2020). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU. *Iapi : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia JIAPI : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Peme.*
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. In *Jurnal Kependudukan Padjadjaran* (Vol. 10, Issue 1).
- Pasolong Harbani. (2012). Metode Penelitian Administrasi. *Alfabeta, Bandung.*
- PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 PROGRAM KELUARGA HARAPAN.
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA BATU. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74>
- Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia*, 10(1). <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091>
- Solichin Abdul Wahab. (2006). *Analisis kebijaksanaan : Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Bumi Askara .
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan : (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)* / Sugiyono. Alfabeta .
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta .
- Suud, M. (2006). *3 orientasi kesejahteraan sosial*. Prestasi Pustaka.
- Syahrial, S., & Desrina, T. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 58–74. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v2i1.63>
- UMAR, H. (2005). *Metode riset komunikasi organisasi : sebuah pendekatan kuantitatif, dilengkapi dengan contoh proposal dan hasil riset komunikasi organisasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).